

PEMBIAYAAN SEKTOR PERTANIAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI DI PULAU SUMATERA

Rismaini¹⁾, Khairul Amri²⁾, Muhammad Zulhilmi³⁾

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Email : 231008032@student.ar-raniry.ac.id,¹ khairul.amri@ar-raniry.ac.id,² em.zulhilmi@ar-raniry.ac.id³

ABSTRACT

Agriculture plays a strategic role in the Indonesian economy, particularly in Sumatra Island, which is predominantly rural. However, limited access to financing especially sharia-based financing remains a major constraint in improving farmers' welfare and public benefit (maslahah). This study aims to analyze the effect of agricultural sector financing on community welfare by integrating an economic approach with the framework of Maqāsid al-Sharī'ah. This research employs a quantitative method using panel data from ten provinces in Sumatra Island during the period 2019–2024. Agricultural financing provided by Islamic financial institutions is used as the independent variable, while community welfare is proxied by Farmers' Terms of Trade (FTT), farmers' income, and rural poverty levels. Panel data regression analysis is conducted using the Common Effect Model, Fixed Effect Model, and Random Effect Model. The results show that agricultural sector financing has a significant positive effect on Farmers' Terms of Trade and farmers' income, and a significant negative effect on rural poverty. These findings confirm that sharia-based financing contributes to the realization of public welfare (maslahah), particularly in safeguarding wealth (ḥifẓ al-māl), protecting life (ḥifẓ al-nafs), and promoting social justice. This study provides policy implications for strengthening sharia-based agricultural financing as an instrument for inclusive and sustainable agricultural development.

Keywords: *Agricultural Sector Financing; Farmers' Welfare; Maqāsid al-Sharī'ah.*

ABSTRAK

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera yang didominasi oleh wilayah perdesaan. Namun, keterbatasan akses pembiayaan, terutama pembiayaan berbasis syariah, masih menjadi kendala utama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat tani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan sektor pertanian terhadap kemaslahatan masyarakat dengan mengintegrasikan pendekatan ekonomi dan Maqāsid al-Syarī'ah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data panel dari sepuluh provinsi di Pulau Sumatera selama periode 2019–2024. Pembiayaan sektor pertanian oleh lembaga keuangan syariah digunakan sebagai variabel independen, sedangkan kemaslahatan masyarakat diproksikan melalui Nilai Tukar Petani (NTP), pendapatan petani, dan tingkat kemiskinan perdesaan. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan pendekatan Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan sektor pertanian berpengaruh signifikan terhadap peningkatan NTP dan pendapatan petani serta terhadap penurunan tingkat kemiskinan perdesaan. Temuan ini mengonfirmasi bahwa pembiayaan syariah berperan dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat, khususnya dalam menjaga harta (ḥifẓ al-māl),

menjaga jiwa (ḥifz al-nafs), dan mendorong keadilan sosial. Penelitian ini memberikan implikasi kebijakan bagi penguatan pembiayaan syariah sebagai instrumen pembangunan pertanian yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pembiayaan Sektor Pertanian; Kesejahteraan Petani; Maqāṣid al-Syarī'ah.
PENDAHULUAN

Sektor pertanian tetap menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya di wilayah perdesaan, melalui kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja, pembentukan pendapatan, dan ketahanan pangan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor pertanian termasuk kehutanan dan perikanan masih memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dengan sekitar 28,15 persen angkatan kerja terserap di sektor ini pada Agustus 2025.¹ Namun, besarnya peran sektor pertanian di tingkat makro belum sepenuhnya tertransmisikan menjadi peningkatan kesejahteraan petani di tingkat mikro yang mengindikasikan adanya kendala struktural dalam sistem produksi dan pembiayaan pertanian.²

Di kawasan barat Indonesia, khususnya Pulau Sumatera, sektor pertanian memainkan peran penting dalam pembangunan regional karena struktur ekonomi wilayah yang masih didominasi oleh aktivitas agraris.³ Sumatera dikenal sebagai sentra produksi berbagai komoditas strategis nasional seperti kelapa sawit, kopi, kakao, dan tanaman pangan.⁴ Namun demikian, proses transformasi ekonomi yang ditandai dengan pergeseran ke sektor industri dan jasa menghadirkan tantangan baru bagi petani, terutama dalam hal akses terhadap sumber pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha pertanian.⁵ Dalam konteks pembangunan nasional, penguatan pembiayaan sektor riil, termasuk sektor pertanian, menjadi bagian dari

¹ Badan Pusat Statistik. (2025). *Keadaan ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2025* (Berita Resmi Statistik No. 103/11/Th. XXVIII). Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id>

² Sihite, M., Hasbi, A. M., Syahputra, R., Amri, M. R., Alwi, R., & Sakuntala, D. (2025). Peran sektor pertanian dan distribusi pendapatan di Indonesia: Analisis model faktor spesifik. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 1–15.

³ Akmal, M., & Wulandari, R. (2022). Akses pembiayaan dan kesejahteraan petani di Indonesia: Tantangan dan implikasi kebijakan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 23(2), 145–160. <https://doi.org/10.23917/jep.v23i2.17890>

⁴ Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik konsumsi pangan 2023 = Statistics of food consumption 2023*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id>

⁵ Kristiantono, P., & Yuliawati. (2022). Dampak perubahan struktur ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan petani dan tenaga kerja sektor pertanian. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 18(2), 141–158. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jsep>

agenda keuangan berkelanjutan dan inklusi keuangan di Indonesia.⁶ Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa perluasan akses pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan merupakan instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, khususnya di wilayah perdesaan

Dalam literatur empiris, pembiayaan sektor pertanian dipandang sebagai faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Dalam penelitian Puryantoro et al, (2024) menunjukkan bahwa akses kredit pertanian berpengaruh positif terhadap kapasitas produksi dan keputusan investasi usaha tani.⁷ Gelata dan Han (2024), melalui studi meta-analisis, menemukan bahwa petani yang memiliki akses pembiayaan formal cenderung memiliki pendapatan yang lebih stabil dan ketahanan ekonomi rumah tangga yang lebih baik dibandingkan petani yang mengalami keterbatasan kredit (*credit constrained farmers*).⁸ Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pembiayaan pertanian tidak hanya berperan dalam meningkatkan output, tetapi juga dalam memperkuat stabilitas ekonomi petani perdesaan.⁹

Dalam konteks Indonesia, akses petani terhadap pembiayaan pertanian masih menghadapi berbagai kendala. Sandy et al, (2025) menegaskan bahwa keterbatasan akses petani terhadap lembaga keuangan formal berdampak signifikan terhadap rendahnya kesejahteraan dan keberlanjutan usaha tani.¹⁰ Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa porsi pembiayaan sektor pertanian terhadap total pembiayaan perbankan nasional masih relatif kecil dan cenderung terkonsentrasi di wilayah dengan infrastruktur

⁶ Hendrarini, H., & Soedarto, T. (2022). Literasi keuangan dan pengelolaan modal usaha tani di wilayah perdesaan. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 15(3), 211–223. <https://doi.org/10.21776/ub.jsep.2022.015.03.5>

⁷ Puryantoro, P., Hidayat, M. R., Aji, J. M. M., & Sari, S. (2024). Does credit access affect decision-making within farmer groups? Evidence from smallholder coffee farmers in Bondowoso, Indonesia. *Asian Journal of Dairy and Food Research*, 43(3), 594–599. <https://doi.org/10.18805/ajdfr.DRF-380>

⁸ Gelata, F. T., & Han, J. (2024). Rural credit access and contract farming nexus in Ethiopia: A meta-analysis. *Heliyon*, 10(1), e23154. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e23154>

⁹ Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Roadmap keuangan berkelanjutan Indonesia tahap II (2021–2025)*. OJK. <https://www.ojk.go.id>

¹⁰ Sandy, R., Winarno, S. T., Setiawan, R. F., Agribisnis, P. S., Pertanian, F., Pembangunan, U., Veteran, N., & Pasuruan, K. (2025). *AGRIBIOS : Jurnal Ilmiah Vol 23 No 02, Bulan November Tahun 2025*. 23(02), 447–455.

keuangan yang lebih maju, seperti Sumatera Utara dan Lampung.¹¹ Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya peran pembiayaan sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan petani antarwilayah.

Dari perspektif ekonomi Islam, pembiayaan berbasis syariah memiliki karakteristik yang berorientasi pada keadilan, keberlanjutan, dan penguatan sektor riil. Buono et al,(2023) menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah, termasuk melalui platform digital, berpengaruh positif terhadap akses modal petani.¹² Hariyani (2023) juga menemukan bahwa pelatihan literasi keuangan pada rumah tangga petani efektif dalam meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan usaha tani.¹³ Prinsip pembiayaan syariah yang berbasis bagi hasil dan bebas dari unsur spekulatif dinilai lebih sesuai dengan karakteristik usaha pertanian yang sarat risiko.¹⁴ Studi menunjukkan bahwa inklusi keuangan syariah, termasuk melalui inovasi digital, berkontribusi positif dalam memperluas akses permodalan petani serta memperkuat aktivitas ekonomi sektor pertanian di Indonesia. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pembiayaan syariah berpotensi menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan pertanian yang inklusif dan berkelanjutan.¹⁵

Selain itu, pengukuran kesejahteraan petani dalam studi empiris sering kali terbatas pada indikator pendapatan atau output pertanian.¹⁶ Pendekatan tersebut dinilai kurang memadai untuk menjelaskan kesejahteraan secara menyeluruh, dalam kerangka teori kesejahteraan dan pembangunan ekonomi, kesejahteraan petani merupakan fenomena

¹¹ -----(2023). *Statistik perbankan syariah Indonesia*. OJK. <https://www.ojk.go.id>

¹² Buono, A., Nugroho, A. D., & Pratama, Y. (2023). Financial literacy, financial inclusion, and farmers' access to agricultural financing in rural Indonesia. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, 20(1), 45–58. <https://doi.org/10.17358/jma.20.1.45>

¹³ Hariyani, D. S. (2022). Pelatihan literasi keuangan dan peningkatan kesejahteraan rumah tangga petani. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 14(1), 65–78. <https://doi.org/10.18196/jesp.v14i1.13241>

¹⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Taksonomi keuangan berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 2*. Kementerian Keuangan RI.

¹⁵ Sha'ari, U. A. S., Hamzah, S. R. B., & Kamil, K. H. (2023). Financial sustainability of a firm: Debt-based or equity-based financing to pursue? *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(2), 199–224. <https://doi.org/10.21098/jimf.v9i2.1653>

¹⁶ Hendro, L., & Risviyaldi. (2025). Optimalisasi penggunaan akad salam dalam pembiayaan sektor pertanian syariah untuk meningkatkan produktivitas petani. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak*, 2(3), 96–106. <https://doi.org/10.61132/jbep.v2i3.1464>

multidimensional yang tidak sepenuhnya tercermin oleh indikator tunggal.¹⁷ Oleh karena itu, penggunaan Nilai Tukar Petani (NTP), tingkat pendapatan, dan tingkat kemiskinan perdesaan menjadi relevan untuk merepresentasikan kondisi ekonomi petani secara komprehensif.¹⁸

Meskipun literatur mengenai pembiayaan pertanian dan kesejahteraan petani telah berkembang, masih terdapat kesenjangan penelitian. Pertama, penelitian yang secara spesifik mengkaji pengaruh pembiayaan sektor pertanian berbasis syariah terhadap kesejahteraan petani secara multidimensional masih relatif terbatas, karena sebagian besar studi pembiayaan syariah agrikultur bersifat konseptual atau bibliometrik, dan belum banyak menguji efektivitasnya terhadap kesejahteraan petani secara empiris.¹⁹ Studi bibliometrik oleh Fathoni et al, (2025) mencatat bahwa kajian pembiayaan syariah agrikultur saat ini masih didominasi oleh pendekatan konseptual dan belum banyak menggunakan bukti empiris untuk mengukur dampaknya terhadap kesejahteraan petani.²⁰ Kedua, sebagian besar studi terdahulu menggunakan data *cross-section* atau *time series*, sehingga tidak mampu menangkap dinamika antarwilayah dan perubahan kesejahteraan petani dari waktu ke waktu secara simultan, terutama di kawasan barat pulau Sumatra yang memiliki karakter agraris spesifik. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan Mubarak (2021) menganalisis pembiayaan bank syariah terhadap sektor pertanian menggunakan data time series dari 2006–2020 dengan metode VECM untuk melihat hubungan pembiayaan dengan indikator ekonomi,²¹ tetapi tidak menggunakan data panel untuk menangkap variasi antarwilayah dan antarwaktu secara simultan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan sektor pertanian berbasis syariah terhadap kesejahteraan petani di Pulau Sumatera dengan

¹⁷ Buono, A., Nugroho, A. D., & Pratama, Y. (2023). Digital Islamic financial inclusion and farmers' access to capital in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(2), 255–276. <https://doi.org/10.21098/jimf.v9i2.1653>

¹⁸ Badan Pusat Statistik. (2023). *Nilai tukar petani dan kemiskinan perdesaan Indonesia*. BPS. <https://www.bps.go.id>

¹⁹ Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan. (2023). *Laporan surveillance perbankan Indonesia (LSPI) Triwulan I 2023*. Otoritas Jasa Keuangan.

²⁰ Fathoni, M. R., Timur, Y. P., Aulia, B., & Putri, C. S. (2025). Peta ilmiah pembiayaan syariah pada agrikultur: Analisis bibliometrik 2000–2025. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 63–88.

²¹ Mubarak, F. (2021). Acceleration of Islamic bank financing in Indonesian agriculture sector. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 6(2), 185–202. <https://doi.org/10.22515/shirkah.v6i2.341>

menggunakan data panel dari 10 provinsi selama periode 2019–2024. Pendekatan regresi data panel digunakan untuk mengendalikan heterogenitas tidak teramati antarprovinsi serta menangkap dinamika perubahan kesejahteraan petani dari waktu ke waktu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kebijakan pembiayaan pertanian yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengestimasi pengaruh pembiayaan sektor pertanian terhadap kesejahteraan petani di Pulau Sumatera. Analisis didasarkan pada data panel yang mengombinasikan dimensi waktu dan wilayah selama periode 2019–2024, sehingga memungkinkan pengendalian heterogenitas tidak teramati antarprovinsi serta menangkap dinamika perubahan kesejahteraan petani dari waktu ke waktu.²²

Data penelitian merupakan data sekunder yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Pertanian. Indikator ekonomi sebagai variabel dependen dalam regresi,²³ direpresentasikan melalui Nilai Tukar Petani (NTP), pendapatan petani, dan tingkat kemiskinan perdesaan sebagai indikator kesejahteraan ekonomi.²⁴ Estimasi dilakukan menggunakan regresi data panel dengan pendekatan *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*, dengan pemilihan model terbaik melalui *uji Chow* dan *uji Hausman*. Signifikansi pengaruh diuji menggunakan uji t dan uji F pada tingkat signifikansi 5 persen, sementara kelayakan model dievaluasi berdasarkan nilai Adjusted R².²⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

²² Baltagi, B. H. (2021). *Econometric analysis of panel data* (6th ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-53953-5>

²³ Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill.

²⁴ Badan Pusat Statistik. (2023). *Nilai tukar petani dan kemiskinan perdesaan Indonesia*. BPS. <https://www.bps.go.id>

²⁵ Greene, W. H. (2018). *Econometric analysis* (8th ed.). Pearson Education.

Hasil dan pembahasan ini menyajikan temuan empiris penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan sektor pertanian terhadap kesejahteraan petani di Pulau Sumatra selama periode 2019–2024. Pembahasan diawali dengan analisis deskriptif untuk menggambarkan perkembangan pembiayaan sektor pertanian serta indikator-indikator kesejahteraan petani, meliputi Nilai Tukar Petani (NTP), pendapatan petani, dan tingkat kemiskinan perdesaan. Analisis ini menunjukkan adanya variasi pembiayaan dan kesejahteraan antarprovinsi, yang mencerminkan perbedaan struktur ekonomi wilayah, kapasitas produksi pertanian, serta akses petani terhadap sumber pembiayaan.

Selanjutnya, analisis regresi data panel digunakan untuk menguji secara empiris pengaruh pembiayaan sektor pertanian terhadap kesejahteraan petani. Hasil estimasi menunjukkan bahwa pembiayaan sektor pertanian berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui perbaikan pendapatan dan daya beli, serta berkontribusi dalam menekan tingkat kemiskinan perdesaan. Temuan ini menegaskan bahwa pembiayaan sektor pertanian bukan sekadar instrumen keuangan, tetapi merupakan faktor strategis dalam pembangunan perdesaan, sehingga penguatan kebijakan pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan menjadi kunci dalam mendorong kesejahteraan petani di Pulau Sumatra.

Analisis hasil penelitian diawali dengan pembahasan perkembangan pembiayaan sektor pertanian sebagai variabel utama yang diduga berpengaruh terhadap kesejahteraan petani. Pemaparan ini bertujuan untuk menggambarkan pola dan dinamika pembiayaan antarprovinsi di Pulau Sumatra selama periode 2019–2024 sebagai dasar bagi analisis empiris selanjutnya.

Perkembangan Pembiayaan Sektor Pertanian Di Pulau Sumatra Selama Periode 2019–2024

Tabel 1. Perkembangan Pembiayaan Sektor Pertanian

Pembiayaan Sektor Pertanian (Ribu Rupiah per Poktan)						
Provinsi	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	536,52	2.384,15	1.644,78	1.983,55	2.780,59	3.971,03
Sumatera Utara	1.630,23	1.360,69	499,99	691,77	843,42	1.006,48

Sumatera Barat	1.101,75	816,67	303,44	565,68	842,30	1.158,85
Riau	1.670,93	2.173,14	1.676,22	8.411,25	9.426,08	10.321,29
Jambi	1.291,57	775,14	873,80	1.052,97	1.342,78	1.883,02
Sumatera Selatan	610,41	445,23	617,97	930,64	1.499,43	2.421,70
Bengkulu	627,38	608,13	711,44	950,04	1.182,45	1.331,59
Lampung	382,43	273,25	58,72	161,31	282,62	324,77
Kepulauan Bangka Belitung	1.137,49	1.419,84	1.343,27	2.888,04	2.804,36	2.564,89
Kepulauan Riau	268,85	231,96	216,33	2.338,73	4.011,34	951,94

Sumber : Data diolah dari Statistik Perbankan Syariah (SPS) OJK, 2025

Data diatas, menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi di Kawasan Barat Indonesia mengalami peningkatan pembiayaan sektor pertanian setelah tahun 2021, yang mengindikasikan adanya penguatan dukungan pembiayaan pada periode tersebut. Provinsi Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu mencatat peningkatan pembiayaan yang relatif konsisten dari tahun ke tahun. Sementara itu, Sumatera Utara dan Sumatera Barat mengalami fluktuasi pada awal periode penelitian sebelum kembali menunjukkan tren peningkatan pada tahun-tahun berikutnya.

Provinsi Lampung menunjukkan tingkat pembiayaan yang relatif lebih rendah dibandingkan provinsi lain, dengan fluktuasi yang cukup tajam. Sedangkan provinsi Riau menunjukkan pola yang paling menonjol, dengan lonjakan pembiayaan sektor pertanian yang sangat signifikan sejak tahun 2022 hingga 2024. Selain itu, Kepulauan Bangka Belitung juga menunjukkan nilai pembiayaan yang relatif tinggi dan stabil, meskipun mengalami sedikit penurunan pada akhir periode penelitian. Kepulauan Riau mengalami lonjakan pembiayaan pada tahun 2022–2023, namun kembali menurun pada tahun 2024, yang mengindikasikan adanya volatilitas pembiayaan di provinsi tersebut.

Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Selama Periode 2019–2024

Tabel 2. Perkembangan Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) Menurut Provinsi (Poin)						
Provinsi	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	98,38	98,74	101,20	107,46	114,35	119,26
Sumatera Utara	104,39	109,83	119,06	121,73	125,32	136,23

Sumatera Barat	100,05	100,59	107,61	110,37	110,28	123,74
Riau	106,39	118,79	138,72	144,19	152,93	173,22
Jambi	101,75	107,62	126,89	135,08	138,11	156,14
Sumatera Selatan	98,92	95,37	107,80	107,70	105,10	120,84
Bengkulu	104,83	114,10	132,60	134,01	146,91	181,90
Lampung	96,96	94,73	101,23	104,30	109,36	124,98
Kepulauan Bangka Belitung	102,35	103,95	125,71	125,95	118,32	133,80
Kepulauan Riau	101,11	99,19	104,38	106,79	104,49	104,81

Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS), 2025

Data menunjukkan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) di Kawasan Barat Indonesia cenderung meningkat selama periode 2019–2024, yang mengindikasikan adanya perbaikan daya beli dan kesejahteraan relatif petani. Provinsi Riau dan Bengkulu mencatat peningkatan NTP paling signifikan, masing-masing dari 106,39 menjadi 173,22 dan dari 104,83 menjadi 181,90. Kenaikan ini mencerminkan penguatan kinerja sektor pertanian serta struktur harga yang semakin menguntungkan petani. Provinsi Aceh, Sumatera Selatan, dan Lampung juga mengalami peningkatan NTP secara bertahap, dari bawah atau mendekati 100 pada awal periode menjadi di atas 119–124 pada tahun 2024, meskipun sempat mengalami fluktuasi pada tahun-tahun tertentu. Sebaliknya, Kepulauan Riau menunjukkan perkembangan NTP yang relatif stagnan, dengan peningkatan terbatas dari 101,11 pada 2019 menjadi 104,81 pada 2024, yang mengindikasikan terbatasnya peran sektor pertanian dalam struktur ekonomi daerah tersebut. Secara keseluruhan, tren peningkatan NTP ini menegaskan adanya perbaikan kesejahteraan petani di Kawasan Barat Indonesia dan menjadi landasan deskriptif yang penting bagi analisis regresi data panel untuk menguji secara empiris pengaruh pembiayaan sektor pertanian terhadap kesejahteraan petani.

Tabel 3. Perkembangan Pendapatan Petani

Provinsi	Rata-Rata Pendapatan Petani (Ribuan Rupiah)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	1.490,24	1.407,50	1.348,60	1.691,20	1.372,50	2.078,60
Sumatera Utara	1.277,73	1.347,30	1.224,10	1.556,30	1.439,00	1.604,00
Sumatera Barat	1.268,57	1.156,90	1.165,60	1.379,40	1.490,10	1.370,40
Riau	1.821,78	1.784,90	1.863,10	2.174,30	1.621,40	2.358,20
Jambi	1.702,78	1.456,30	1.564,30	2.069,10	1.432,40	2.433,60
Sumatera Selatan	1.387,02	1.325,00	1.467,50	1.807,00	1.379,00	2.120,10
Bengkulu	1.255,89	1.217,30	1.216,60	1.584,70	1.367,00	1.944,00
Lampung	1.254,64	1.195,10	1.177,50	1.473,30	1.391,70	1.591,20
Bangka Belitung	1.747,66	1.586,40	1.650,10	2.111,00	1.688,50	2.360,70
Kepulauan Riau	1.764,01	1.719,40	1.548,50	1.976,50	2.400,30	2.198,70

Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS), 2025

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata petani di Kawasan Barat Indonesia selama periode 2019–2024 cenderung mengalami peningkatan, meskipun disertai fluktuasi antarprovinsi dan antarwaktu. Provinsi Riau dan Jambi mencatat kenaikan pendapatan yang relatif signifikan, masing-masing dari Rp1.821,78 ribu dan Rp1.702,78 ribu pada 2019 menjadi Rp2.358,20 ribu dan Rp2.433,60 ribu pada 2024. Aceh dan Sumatera Selatan juga menunjukkan peningkatan pendapatan pada akhir periode penelitian, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun-tahun awal. Sementara itu, provinsi seperti Sumatera Barat, Bengkulu, dan Lampung memperlihatkan kenaikan yang lebih moderat dengan pola fluktuatif. Kepulauan Riau dan Bangka Belitung menunjukkan tingkat pendapatan yang relatif tinggi dibandingkan provinsi lain, meskipun mengalami variasi antar tahun. Secara keseluruhan, perkembangan pendapatan petani ini mengindikasikan adanya perbaikan kesejahteraan ekonomi petani, yang selanjutnya dianalisis lebih lanjut dalam kaitannya dengan peran pembiayaan sektor pertanian melalui pendekatan regresi data panel.

Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Perdesaan Periode 2019–2024

Tabel 4. Perkembangan Penduduk Miskin Perdesaan

Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi (Persen)						
Provinsi	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	18,03	17,46	17,78	16,87	16,92	16,75
Sumatera Utara	9,14	8,77	8,84	7,98	8,03	8,08
Sumatera Barat	7,88	7,43	7,91	6,86	7,23	7,28
Riau	7,62	7,29	7,51	7,08	6,65	6,61
Jambi	6,53	6,23	6,42	6,19	6,28	5,90
Sumatera Selatan	13,02	12,96	13,12	12,31	12,21	11,53
Bengkulu	15,49	15,16	15,28	14,49	13,96	13,56
Lampung	14,27	13,83	14,18	13,14	12,65	11,97
Bangka Belitung	6,79	6,33	6,63	6,26	5,85	6,17
Kepulauan Riau	11,04	10,43	11,10	10,68	10,69	9,94

Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS), 2025

Data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin perdesaan di Kawasan Barat Indonesia selama periode 2019–2024 cenderung mengalami penurunan, meskipun dengan pola yang berbeda antarprovinsi. Provinsi Aceh masih mencatat tingkat kemiskinan perdesaan tertinggi, namun menurun dari 18,03 persen pada 2019 menjadi 16,75 persen pada 2024. Penurunan yang relatif konsisten juga terlihat di Riau (7,62 persen menjadi 6,61 persen), Jambi (6,53 persen menjadi 5,90 persen), Sumatera Selatan (13,02 persen menjadi 11,53 persen), Bengkulu (15,49 persen menjadi 13,56 persen), dan Lampung (14,27 persen menjadi 11,97 persen). Sementara itu, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau menunjukkan fluktuasi, meskipun secara umum berada pada tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan provinsi lain. Secara keseluruhan, tren penurunan kemiskinan perdesaan ini mengindikasikan adanya perbaikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat tani, yang selanjutnya dianalisis secara empiris dalam kaitannya dengan pembiayaan sektor pertanian melalui pendekatan regresi data panel.

Hasil Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran awal mengenai karakteristik data penelitian sebelum dilakukan analisis inferensial lebih lanjut. Analisis ini mencakup ukuran pemusatan data (mean dan median), ukuran penyebaran (nilai minimum, maksimum, dan standar deviasi), serta bentuk distribusi data melalui indikator skewness, kurtosis, dan uji *Jarque-Bera*. Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk memahami pola, tingkat variasi, serta kelayakan data sebagai dasar estimasi model regresi data panel.

Tabel 5. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Statistik	Nilai Tukar Petani (Poin)	Kemiskinan Perdesaan (Persen)	Pendapatan Petani (Ribu Rupiah per Orang)	Pembiayaan Sektor Pertanian (Ribu Rupiah per Poktan)
Mean	117,015	10,4098	1.614,275	1.643,611
Median	109,595	9,540	1.552,400	1.077,361
Maximum	181,900	18,030	2.433,600	10.321,290
Minimum	94,730	5,850	1.156,900	58,717
Standar Deviasi	19,006	3,751	345,209	2.006,450
Skewness	1,367	0,470	0,799	3,012
Kurtosis	4,728	1,908	2,727	12,293
<i>Jarque-Bera</i>	26,166	5,228	6,575	306,684
Probabilitas	0,000	0,073	0,037	0,000
Observasi	60	60	60	60

Sumber: Data diolah dari EViews, 2026

Berdasarkan Tabel 5, Nilai Tukar Petani (NTP) memiliki nilai rata-rata sebesar 117,02 dengan rentang antara 94,73 hingga 181,90. Nilai rata-rata NTP yang berada di atas 100 menunjukkan bahwa secara umum petani berada pada kondisi surplus, meskipun standar deviasi sebesar 19,00 mengindikasikan adanya perbedaan kesejahteraan yang cukup signifikan antarwilayah dan antarperiode. Variasi ini menandakan bahwa peningkatan kesejahteraan petani belum merata di seluruh provinsi.

Variabel kemiskinan perdesaan menunjukkan nilai rata-rata sebesar 10,41 persen, dengan kisaran antara 5,85 persen hingga 18,03 persen. Standar deviasi sebesar 3,75 mencerminkan variasi tingkat kemiskinan yang moderat. Distribusi data kemiskinan relatif

mendekati normal, sebagaimana ditunjukkan oleh probabilitas uji Jarque–Bera sebesar 0,073, yang mengindikasikan bahwa kemiskinan perdesaan masih terdapat perbedaan tingkat kemiskinan antarwilayah, sebagian besar observasi masih terkonsentrasi di sekitar nilai rata-rata.

Pendapatan petani menunjukkan nilai rata-rata sebesar Rp1.614,28 ribu per orang, dengan nilai minimum Rp1.156,90 ribu dan maksimum Rp2.433,60 ribu. Standar deviasi sebesar 345,21 mencerminkan adanya perbedaan pendapatan yang cukup signifikan antarwilayah dan antarperiode. Distribusi pendapatan yang cenderung miring ke kanan mengindikasikan adanya ketimpangan, di mana sebagian besar petani berada pada tingkat pendapatan relatif rendah, sementara sebagian kecil memperoleh pendapatan yang jauh lebih tinggi. Kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan akses terhadap faktor produksi, modal, dan teknologi.

Sementara itu, pembiayaan sektor pertanian memiliki nilai rata-rata sebesar Rp1.643,61 per poktan, dengan rentang yang sangat lebar, yaitu antara Rp58,72 hingga Rp10.321,29. Standar deviasi yang tinggi (2.006,45) serta nilai skewness dan kurtosis yang besar menunjukkan bahwa distribusi pembiayaan tidak normal dan mengandung pencilan, yang mencerminkan ketimpangan penyaluran pembiayaan antarwilayah, di mana sebagian kecil wilayah menerima pembiayaan dalam jumlah sangat besar dibandingkan wilayah lainnya.

Secara keseluruhan, hasil statistik deskriptif menunjukkan adanya heterogenitas yang cukup tinggi pada seluruh variabel penelitian, baik dari sisi kesejahteraan petani, tingkat kemiskinan, pendapatan, maupun pembiayaan sektor pertanian. Kondisi ini menegaskan bahwa pendekatan regresi data panel sangat relevan digunakan karena mampu mengakomodasi perbedaan karakteristik antarwilayah dan dinamika antarperiode. Temuan deskriptif ini menjadi landasan awal yang penting dalam mengkaji secara empiris pengaruh pembiayaan sektor pertanian terhadap kesejahteraan petani secara lebih mendalam.

Hasil Estimasi Variabel Penelitian

Hasil estimasi regresi data panel secara tegas menunjukkan adanya hubungan empiris antara variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini. Penggunaan metode regresi data panel memungkinkan identifikasi yang lebih komprehensif terhadap arah pengaruh, besaran kontribusi, serta tingkat signifikansi statistik masing-masing variabel independen terhadap kesejahteraan petani, baik secara parsial maupun simultan. Pendekatan ini memberikan keunggulan metodologis karena mampu menangkap heterogenitas antarprovinsi di Pulau Sumatra sekaligus dinamika perubahan antarwaktu selama periode pengamatan, sehingga hasil estimasi yang diperoleh lebih akurat dan reliabel.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa pembiayaan sektor pertanian memiliki peran penting dalam memengaruhi kesejahteraan petani. Variabel-variabel independen yang terbukti signifikan secara statistik mengindikasikan bahwa peningkatan pembiayaan berkontribusi terhadap perbaikan kondisi ekonomi petani, baik melalui peningkatan pendapatan, penguatan daya beli, maupun penurunan tingkat kemiskinan perdesaan. Sebaliknya, variabel yang tidak menunjukkan signifikansi statistik mencerminkan adanya keterbatasan efektivitas pembiayaan, yang dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik wilayah, struktur komoditas, atau belum optimalnya penyaluran pembiayaan di sektor pertanian.

Temuan estimasi regresi ini menjadi dasar utama dalam pengujian hipotesis penelitian dan penarikan kesimpulan empiris. Hasil regresi tidak hanya berfungsi sebagai alat verifikasi statistik, tetapi juga sebagai pijakan analitis dalam merumuskan implikasi ekonomi dan kebijakan. Dengan demikian, temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kebijakan pembiayaan sektor pertanian yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan sebagai strategi utama dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Pulau Sumatra.

Analisis Pengaruh Pembiayaan terhadap Nilai Tukar Petani

Analisis pengaruh pembiayaan sektor pertanian terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) dilakukan untuk menilai peran pembiayaan dalam meningkatkan kesejahteraan petani, dengan NTP digunakan sebagai indikator utama karena mencerminkan perbandingan antara indeks harga yang diterima dan indeks harga yang dibayar petani. Analisis dilakukan

menggunakan regresi data panel dengan spesifikasi *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM), di mana pembiayaan sektor pertanian diposisikan sebagai variabel independen utama untuk menangkap pengaruh pembiayaan terhadap variasi kesejahteraan petani antarprovinsi dan antarperiode waktu secara simultan. Penggunaan beberapa spesifikasi model ini bertujuan untuk memperoleh model estimasi terbaik serta memastikan bahwa hubungan empiris antara pembiayaan sektor pertanian dan NTP dapat dijelaskan secara kuat, konsisten, dan memiliki makna ekonomi.

Tabel 6. Hasil Analisis pengaruh pembiayaan terhadap nilai tukar petani

Variabel dependen: nilai tukar petani						
Pendekatan regresi panel						
	<i>Common Effect</i>		<i>Fixed Effect</i>		<i>Random Effect</i>	
	Koefisien estimasi	p-value	Koefisien estimasi	p-value	Koefisien estimasi	p-value
C	4,227 [34,237]	0,000	4,219 [26,506]	0,000	4,222 [30,013]	0,000
Pembiayaan	0,075 [4,278]	0,001	0,076 [5,353]	0,015	0,076 [3,839]	0,003
R ²	0,239		0,555		0,205	
Adjusted R ²	0,266		0,464		0,191	
F-stat	18,308		6,118		14,999	
Prob(F-stat)	0,007		0,006		0,027	
DW-stat	0,517		0,891		0,763	
Normality test						
Jarque–Bera	6,120		0,175		6,031	
P-value	0,046		0,915		0,049	
<i>Chow-test</i>			<i>Hausman Test</i>			
Effects Test	Stat	p-value	Test Summary	X Stat	p-value	
Cross-section F	3.860	0,009	Cross-section random	0,019	0,964	
Cross-section X	32.157	0,002				
<i>Residual Cross-Section Dependence Test</i>						

<i>Breusch-Pagan LM</i>	152,631	0,000
<i>Pesaran scaled LM</i>	11,345	0,000
<i>Pesaran CD</i>	9,571	0,000

Sumber: Data diolah dari EViews, 2026

Keterangan: Angka dalam [] menunjukkan nilai t-statistik

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 6, pembiayaan sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap NTP pada seluruh spesifikasi model. Pada model CEM, koefisien pembiayaan sebesar 0,075 dengan p-value 0,001 menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan secara statistik meningkatkan NTP pada tingkat signifikansi 1 persen. Hasil yang konsisten juga ditunjukkan oleh FEM dan REM, dengan koefisien masing-masing sebesar 0,076 dan tingkat signifikansi yang kuat (p-value < 0,05). Konsistensi tanda dan signifikansi koefisien ini menegaskan bahwa hubungan antara pembiayaan dan NTP bersifat stabil dan tidak sensitif terhadap perbedaan spesifikasi model.

Secara ekonomi, koefisien pembiayaan yang positif mengindikasikan bahwa peningkatan pembiayaan mendorong kenaikan daya beli petani. Mekanisme ini terjadi melalui peningkatan akses terhadap input produksi, adopsi teknologi, serta efisiensi usaha tani yang lebih baik. Dengan tersedianya modal yang memadai, petani memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas dan skala usaha, sehingga pendapatan relatif meningkat dibandingkan dengan biaya produksi.

Dari sisi daya jelaskan model, nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan variasi antarspesifikasi. Model CEM memiliki R^2 sebesar 0,239, yang mengindikasikan bahwa pembiayaan menjelaskan sekitar 23,9 persen variasi NTP. Sementara itu, FEM menunjukkan R^2 yang lebih tinggi sebesar 0,555, yang menegaskan pentingnya perbedaan karakteristik antarwilayah dalam menjelaskan variasi NTP. Hasil uji Chow menunjukkan bahwa FEM lebih tepat dibandingkan CEM, namun uji Hausman menghasilkan p-value sebesar 0,964, yang mengindikasikan bahwa REM merupakan model yang paling efisien dan konsisten. Oleh karena itu, REM dipilih sebagai model utama dalam interpretasi hasil.

Uji F-statistik menunjukkan bahwa pembiayaan sektor pertanian secara simultan berpengaruh signifikan terhadap NTP pada seluruh model, dengan nilai probabilitas di bawah taraf signifikansi 5 persen. Meskipun terdapat indikasi penyimpangan ringan dari asumsi normalitas dan autokorelasi pada beberapa model, kondisi ini masih dapat ditoleransi mengingat sifat asimtotik estimator data panel dan jumlah observasi yang terbatas. Selain itu, hasil uji ketergantungan penampang silang menunjukkan adanya keterkaitan antarwilayah, yang mencerminkan integrasi ekonomi dan dinamika pasar pertanian lintas daerah.

Secara keseluruhan, hasil estimasi ini menegaskan bahwa pembiayaan sektor pertanian memiliki peran strategis dalam meningkatkan Nilai Tukar Petani. Dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa pembiayaan sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap NTP dinyatakan diterima. Temuan ini memperkuat argumen bahwa penguatan akses pembiayaan yang merata dan berkelanjutan merupakan instrumen kebijakan penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

Keterkaitan Pengaruh Pembiayaan terhadap Nilai Tukar Petani dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Keterkaitan pengaruh pembiayaan terhadap nilai tukar menunjukkan positif dan signifikan pembiayaan sektor pertanian terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan bahwa pembiayaan berperan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani, yang dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* selaras dengan tujuan *hifẓ al-māl* melalui penguatan dan pengembangan aset produktif petani. Peningkatan NTP mencerminkan membaiknya pendapatan relatif petani terhadap biaya produksi, sehingga mendukung pemenuhan kebutuhan dasar (*hifẓ al-naḥs*), membuka akses terhadap pendidikan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (*hifẓ al-'aql*), serta menjamin keberlanjutan kesejahteraan keluarga dan generasi petani (*hifẓ al-nasl*). Dengan demikian, pembiayaan sektor pertanian tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme kebijakan yang mendukung realisasi kemaslahatan petani secara komprehensif dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan utama syariat Islam.

Analisis Pengaruh Pembiayaan Terhadap Pendapatan Petani

Analisis pengaruh pembiayaan sektor pertanian terhadap pendapatan petani dilakukan untuk menguji sejauh mana pembiayaan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani. Pendapatan petani digunakan sebagai indikator utama karena mencerminkan kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan daya beli, serta menjaga keberlanjutan usaha tani dalam jangka menengah dan panjang. Peningkatan pendapatan juga menjadi prasyarat penting bagi penguatan sektor pertanian, karena berpengaruh langsung terhadap kapasitas petani dalam mengadopsi teknologi, meningkatkan produktivitas, dan memperluas skala usaha.

Pengujian empiris dilakukan menggunakan regresi data panel yang mengombinasikan dimensi waktu dan wilayah untuk menangkap dinamika pendapatan petani antarperiode sekaligus mengendalikan perbedaan karakteristik struktural antarprovinsi. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi pengaruh pembiayaan sektor pertanian secara lebih komprehensif, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta menghasilkan estimasi yang lebih akurat dan konsisten. Dengan demikian, hasil analisis ini tidak hanya memberikan bukti empiris mengenai peran pembiayaan terhadap peningkatan pendapatan petani, tetapi juga menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan pembiayaan pertanian yang lebih efektif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani.

Tabel 7. Hasil Analisis pembiayaan terhadap pendapatan petani

	Variabel dependen: pendapatan petani					
	Pendekatan regresi panel					
	Common Effect		Fixed Effect		Random Effect	
	Koefisien estimasi	p-value	Koefisien estimasi	p-value	Koefisien estimasi	p-value
C	6,54 [41,317]	0,000	6,536 [32,941]	0,000	6,538 [36,626]	0,000
Pembiayaan	0,118 [5,259]	0,000	0,119 [4,194]	0,001	0,119 [4,751]	0,000
R ²	0,322		0,625		0,283	
Adjusted R ²	0,311		0,549		0,271	
F-stat	27,666		8,183		22,972	
Prob(F-stat)	0,002		0,000		0,012	

DW-stat	1,346	2,435	2,093		
Normality test					
Jarque–Bera	2,186	1.600	2,179		
p-value	0,335	0.449	0,033		
Chow-test		Hausman Test			
Effects Test	Stat	p-value	Test Summary	X Stat	p-value
Cross-section F	4,397	0,003	Cross-section random	0,030	0,986
Cross-section X	35.525	0,000			
Residual Cross-Section Dependence Test					
Breusch-Pagan LM	98.813	0,000			
Pesaran scaled LM	5,672	0,000			
Pesaran CD	7,447	0,000			

Sumber: Data diolah menggunakan EViews, 2026

Keterangan: Angka dalam [] menunjukkan nilai t-statistik

Hasil estimasi pada Tabel.7 menunjukkan bahwa pembiayaan sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan petani pada seluruh spesifikasi model yang digunakan. Pada Common Effect Model, koefisien pembiayaan sebesar 0,118 dengan p-value 0,000 menunjukkan pengaruh signifikan pada taraf 1 persen. Artinya, peningkatan pembiayaan sektor pertanian secara nyata berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan petani. Temuan ini diperkuat oleh hasil estimasi pada *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) yang masing-masing menghasilkan koefisien sebesar 0,119 dengan tingkat signifikansi yang juga sangat kuat. Konsistensi nilai koefisien, tanda positif, dan signifikansi statistik pada ketiga model tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antara pembiayaan sektor pertanian dan pendapatan petani bersifat stabil, robust, serta tidak sensitif terhadap perbedaan pendekatan estimasi yang digunakan.

Dari sisi kemampuan penjelasan model, *Fixed Effect Model* menunjukkan nilai R^2 tertinggi sebesar 0,625 dengan adjusted R^2 sebesar 0,549, yang mengindikasikan bahwa sekitar 54,9 persen variasi pendapatan petani dapat dijelaskan oleh pembiayaan sektor pertanian dan perbedaan karakteristik tetap antarprovinsi. Hasil uji Chow dengan p-value sebesar 0,003 secara statistik mendukung penggunaan *Fixed Effect Model* dibandingkan

Common Effect Model, yang menunjukkan adanya perbedaan karakteristik spesifik antarprovinsi yang perlu dikendalikan dalam model. Sementara itu, hasil uji Hausman mengarah pada *Random Effect Model*, namun pertimbangan tidak hanya didasarkan pada uji statistik semata, melainkan juga pada pemenuhan asumsi klasik dan kualitas estimasi secara keseluruhan.

Berdasarkan pengujian asumsi klasik, *Fixed Effect Model* dinilai lebih unggul karena residual model terdistribusi normal dengan p-value sebesar 0,449 serta tidak menunjukkan adanya masalah autokorelasi yang serius, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 2,435. Selain itu, hasil uji ketergantungan penampang menunjukkan adanya keterkaitan signifikan antarwilayah, yang mengindikasikan bahwa dinamika pendapatan petani di suatu provinsi tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh kondisi wilayah lain melalui mekanisme integrasi pasar, arus distribusi komoditas pertanian, dan keterkaitan rantai pasok antarprovinsi. Kondisi ini memperkuat relevansi penggunaan pendekatan data panel dalam menangkap interaksi antarwilayah secara lebih komprehensif.

Secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan konsistensi koefisien pembiayaan yang berada pada kisaran 0,118–0,119, signifikansi simultan model, serta kualitas estimasi yang lebih baik pada *Fixed Effect Model*, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan sektor pertanian terbukti secara empiris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan petani. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan akses dan alokasi pembiayaan di sektor pertanian memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan pendapatan, memperkuat keberlanjutan usaha tani, serta pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan demikian, hipotesis penelitian (H_1) diterima, dan pembiayaan sektor pertanian dikukuhkan sebagai instrumen kebijakan yang efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi perdesaan di wilayah penelitian.

Keterkaitan Pengaruh Pembiayaan terhadap Pendapatan Petani dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Keterkaitan Pengaruh Pembiayaan terhadap Pendapatan Petani berpengaruh positif dan signifikan pembiayaan sektor pertanian terhadap pendapatan petani menunjukkan bahwa

pembiayaan berperan strategis dalam mewujudkan tujuan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya *hifẓ al-māl*, melalui peningkatan dan pengembangan harta secara produktif. Peningkatan pendapatan mencerminkan kemampuan petani dalam menjaga keberlanjutan usaha tani serta mengurangi kerentanan ekonomi, yang selanjutnya mendukung pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga (*hifẓ al-nafs*), memperluas akses terhadap pendidikan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (*hifẓ al-'aql*), serta menjamin keberlangsungan kesejahteraan keluarga dan generasi petani (*hifẓ al-nasl*). Dengan demikian, pembiayaan sektor pertanian tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana kebijakan yang mendorong kemaslahatan petani secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan utama syariat Islam.

Analisis Pengaruh Pembiayaan terhadap Tingkat Kemiskinan di Perdesaan

Analisis regresi data panel digunakan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan sektor pertanian terhadap tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan dengan mempertimbangkan variasi antarprovinsi dan antarperiode waktu. Tingkat kemiskinan perdesaan digunakan sebagai indikator kesejahteraan negatif untuk menilai sejauh mana pembiayaan sektor pertanian berperan dalam menekan kemiskinan, sementara pendekatan data panel dipilih karena mampu menangkap dinamika perubahan kemiskinan sekaligus mengendalikan perbedaan karakteristik struktural antarwilayah. Analisis empiris dilakukan menggunakan tiga spesifikasi model, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM), guna memperoleh estimasi yang stabil, konsisten, dan komprehensif, serta memastikan bahwa hubungan empiris antara pembiayaan sektor pertanian dan tingkat kemiskinan perdesaan dapat dijelaskan secara kuat dan memiliki makna ekonomi.

Tabel 8. Pengaruh analisis pembiayaan terhadap tingkat kemiskinan di perdesaan

Variabel dependen: kemiskinan di perdesaan						
Pendekatan regresi panel						
	Common Effect		Fixed Effect		Random Effect	
	Koefisien	p-value	Koefisien	p-value	Koefisien	p-value
	estimasi		estimasi		estimasi	
C	3,065	0,000	2,530	0,000	2,533	0,000
	[9,548]		[37,774]		[18,896]	
Pembiayaan	-0,113	0,016	-0,036	0,005	-0,036	0,003
	[2,471]		[-3,759]		[-3.817]	
R ²	0,095		0,986		0,201	
Adjusted R ²	0,079		0,983		0,187	
F-stat	6,109		348,471		14,649	
Prob(F-stat)	0,016		0,000		0,032	
DW-stat	0,047		1,228		1,045	
Normality test						
Jarque–Bera	3,974		0,283		4,754	
p-value	0,137		0,867		0,092	
Chow-test			Hausman Test			
	Effects Test	Stat	p-value	Test Summary	X Stat	p-value
	Cross-section F	349,772	0,000	Cross-section random	0,696	0,403
	Cross-section X	250,687	0,000			
Residual Cross-Section Dependence Test						
	Breusch-Pagan LM	99,489	0,000			
	Pesaran scaled LM	5,743	0,000			
	Pesaran CD	7,802	0,000			

Sumber: Data diolah menggunakan EViews, 2026

Keterangan: Angka dalam [] menunjukkan nilai t-statistik

Hasil analisis estimasi pada Tabel 8 menunjukkan bahwa pembiayaan sektor pertanian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan perdesaan pada seluruh spesifikasi model. Pada CEM, koefisien pembiayaan sebesar -0,113 dengan p-value 0,016 menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan secara signifikan menurunkan tingkat kemiskinan perdesaan pada taraf 5 persen. Hasil yang konsisten ditunjukkan oleh FEM dan

REM dengan koefisien masing-masing sebesar $-0,036$ dan tingkat signifikansi yang lebih kuat ($p\text{-value} < 0,01$). Konsistensi tanda negatif dan signifikansi statistik ini menegaskan bahwa hubungan antara pembiayaan dan penurunan kemiskinan bersifat robust serta tidak sensitif terhadap perbedaan pendekatan estimasi.

Dari sisi kemampuan penjelasan model, FEM menunjukkan nilai R^2 tertinggi sebesar $0,986$ dengan adjusted R^2 sebesar $0,983$, yang mengindikasikan bahwa variasi kemiskinan perdesaan sangat dipengaruhi oleh karakteristik tetap antarprovinsi. Hasil uji Chow ($p\text{-value} 0,000$) mendukung penggunaan FEM dibandingkan CEM, sementara uji Hausman secara statistik mengarah pada REM. Namun, dengan mempertimbangkan daya jelaskan model, stabilitas estimasi, serta hasil uji asumsi klasik khususnya autokorelasi yang relatif lebih rendah pada FEM model efek tetap dinilai lebih representatif dalam menjelaskan pengaruh pembiayaan terhadap kemiskinan perdesaan.

Hasil uji simultan (uji F) pada seluruh model menunjukkan signifikansi statistik, yang menegaskan bahwa pembiayaan sektor pertanian secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan perdesaan. Selain itu, uji ketergantungan penampang menunjukkan adanya keterkaitan antarwilayah, yang mengindikasikan bahwa dinamika kemiskinan di suatu provinsi dipengaruhi oleh kondisi wilayah lain melalui mekanisme integrasi ekonomi dan pasar tenaga kerja.

Uji *Jarque-Bera* menunjukkan bahwa residual pada CEM, FEM, dan REM berdistribusi normal dengan $p\text{-value}$ masing-masing sebesar $0,137$; $0,867$; dan $0,092$ ($>0,05$), sehingga estimasi model tidak mengalami distorsi akibat pelanggaran asumsi normalitas. Uji Durbin-Watson mengindikasikan autokorelasi positif yang kuat pada CEM ($DW = 0,047$), autokorelasi ringan pada REM ($DW = 1,045$), dan autokorelasi relatif rendah pada FEM ($DW = 1,228$), yang menegaskan FEM sebagai spesifikasi model paling robust. Selanjutnya, uji ketergantungan cross-section melalui Breusch-Pagan LM, Pesaran scaled LM, dan Pesaran CD yang seluruhnya signifikan pada taraf 1 persen ($p\text{-value} = 0,000$) menunjukkan adanya keterkaitan antarprovinsi, mencerminkan efek spillover ekonomi regional. Secara empiris, hasil estimasi menegaskan bahwa pembiayaan sektor pertanian berperan strategis dalam

meningkatkan kesejahteraan petani dan menurunkan kemiskinan perdesaan melalui peningkatan akses modal, efisiensi produksi, dan kapasitas usaha tani, sehingga penguatan kebijakan pembiayaan pertanian yang terintegrasi dan berorientasi pada petani rentan menjadi implikasi kebijakan utama penelitian ini.

Secara keseluruhan, hasil estimasi menegaskan bahwa pembiayaan sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menekan tingkat kemiskinan di perdesaan. Koefisien pembiayaan yang negatif dan signifikan pada seluruh model mendukung penerimaan hipotesis penelitian (H_1), bahwa peningkatan pembiayaan sektor pertanian secara empiris mampu mengurangi kemiskinan perdesaan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa penguatan akses pembiayaan pertanian yang inklusif dan tepat sasaran merupakan instrumen kebijakan yang efektif dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

Keterkaitan hasil analisis estimasi pengaruh pembiayaan terhadap tingkat kemiskinan di perdesaan dengan *Maqasiq al-syariah*

Keterkaitannya ialah hasil regresi data panel menunjukkan bahwa pembiayaan sektor pertanian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan perdesaan, yang menegaskan perannya dalam meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesempatan kerja masyarakat tani. Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, temuan ini merefleksikan tercapainya *hiḏ al-māl* melalui penguatan akses modal produktif dan distribusi harta yang lebih adil, serta *hiḏ al-naḑs* melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat perdesaan. Stabilitas ekonomi yang dihasilkan juga mendukung *hiḏ al-'aql* dan *hiḏ al-naṑl* dengan membuka akses pendidikan dan menjamin keberlanjutan kesejahteraan generasi, sehingga pembiayaan sektor pertanian berfungsi sebagai instrumen strategis pengentasan kemiskinan sekaligus realisasi kemaslahatan sesuai tujuan syariat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan sektor pertanian di Pulau Sumatra selama periode 2019–2024 mengalami perkembangan yang tidak merata antarprovinsi,

mencerminkan perbedaan kapasitas ekonomi daerah dan akses petani terhadap sumber pembiayaan. Ketimpangan ini berimplikasi langsung pada variasi tingkat kesejahteraan petani, yang tercermin melalui perbedaan Nilai Tukar Petani (NTP), pendapatan petani, dan tingkat kemiskinan perdesaan, sehingga menegaskan pentingnya pembiayaan sebagai faktor kunci dalam dinamika ekonomi perdesaan.

Analisis regresi data panel secara konsisten membuktikan bahwa pembiayaan sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) dan pendapatan petani, serta berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan perdesaan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan secara nyata memperkuat daya beli petani, meningkatkan pendapatan, dan menekan kemiskinan di wilayah perdesaan. Konsistensi hasil pada berbagai spesifikasi model menegaskan bahwa pengaruh pembiayaan bersifat kuat, stabil, dan tidak bergantung pada pendekatan estimasi yang digunakan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pembiayaan sektor pertanian bukan sekadar instrumen pendukung, melainkan faktor strategis dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong pembangunan perdesaan. Oleh karena itu, kebijakan pembiayaan pertanian harus diarahkan secara lebih terfokus, inklusif, dan berkelanjutan untuk memperluas akses petani terhadap modal produktif. Penguatan peran pembiayaan sektor pertanian menjadi kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan perdesaan di Pulau Sumatra.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, M., & Wulandari, R. (2022). Akses pembiayaan dan kesejahteraan petani di Indonesia: Tantangan dan implikasi kebijakan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 23(2), 145–160. <https://doi.org/10.23917/jep.v23i2.17890>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Nilai tukar petani dan kemiskinan perdesaan Indonesia*. BPS. <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik konsumsi pangan 2023 = Statistics of food consumption 2023*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Keadaan ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2025* (Berita Resmi Statistik No. 103/11/Th. XXVIII). Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id>
- Baltagi, B. H. (2021). *Econometric analysis of panel data* (6th ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-53953-5>
- Buono, A., Nugroho, A. D., & Pratama, Y. (2023). Financial literacy, financial inclusion, and farmers' access to agricultural financing in rural Indonesia. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, 20(1), 45–58. <https://doi.org/10.17358/jma.20.1.45>
- Buono, A., Nugroho, A. D., & Pratama, Y. (2023). Digital Islamic financial inclusion and farmers' access to capital in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(2), 255–276. <https://doi.org/10.21098/jimf.v9i2.1653>
- Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan. (2023). *Laporan surveillance perbankan Indonesia (LSPI) Triwulan I 2023*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Fathoni, M. R., Timur, Y. P., Aulia, B., & Putri, C. S. (2025). Peta ilmiah pembiayaan syariah pada agrikultur: Analisis bibliometrik 2000–2025. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 63–88.
- Gelata, F. T., & Han, J. (2024). Rural credit access and contract farming nexus in Ethiopia: A meta-analysis. *Heliyon*, 10(1), e23154. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e23154>
- Greene, W. H. (2018). *Econometric analysis* (8th ed.). Pearson Education.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Hariyani, D. S. (2022). Pelatihan literasi keuangan dan peningkatan kesejahteraan rumah tangga petani. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 14(1), 65–78. <https://doi.org/10.18196/jesp.v14i1.13241>
- Hendrarini, H., & Soedarto, T. (2022). Literasi keuangan dan pengelolaan modal usaha tani di wilayah perdesaan. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 15(3), 211–223. <https://doi.org/10.21776/ub.jsep.2022.015.03.5>
- Hendro, L., & Risviyaldi. (2025). Optimalisasi penggunaan akad salam dalam pembiayaan sektor pertanian syariah untuk meningkatkan produktivitas petani. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak*, 2(3), 96–106. <https://doi.org/10.61132/jbep.v2i3.1464>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Taksonomi keuangan berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 2*. Kementerian Keuangan RI.
- Kristiantono, P., & Yulawati. (2022). Dampak perubahan struktur ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan petani dan tenaga kerja sektor pertanian. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 18(2), 141–158. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jsep>
- Mubarak, F. (2021). Acceleration of Islamic bank financing in Indonesian agriculture sector. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 6(2), 185–202. <https://doi.org/10.22515/shirkah.v6i2.341>

- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Roadmap keuangan berkelanjutan Indonesia tahap II (2021–2025)*. OJK. <https://www.ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik perbankan syariah Indonesia*. OJK. <https://www.ojk.go.id>
- Puryantoro, P., Hidayat, M. R., Aji, J. M. M., & Sari, S. (2024). Does credit access affect decision-making within farmer groups? Evidence from smallholder coffee farmers in Bondowoso, Indonesia. *Asian Journal of Dairy and Food Research*, 43(3), 594–599. <https://doi.org/10.18805/ajdfr.DRF-380>
- Sandy, R., Winarno, S. T., Setiawan, R. F., Agribisnis, P. S., Pertanian, F., Pembangunan, U., Veteran, N., & Pasuruan, K. (2025). *AGRIBIOS : Jurnal Ilmiah Vol 23 No 02, Bulan November Tahun 2025*. 23(02), 447–455.
- Sha'ari, U. A. S., Hamzah, S. R. B., & Kamil, K. H. (2023). Financial sustainability of a firm: Debt-based or equity-based financing to pursue? *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(2), 199–224. <https://doi.org/10.21098/jimf.v9i2.1653>
- Sihite, M., Hsb, A. M., Syahputra, R., Amri, M. R., Alwi, R., & Sakuntala, D. (2025). Peran sektor pertanian dan distribusi pendapatan di Indonesia: Analisis model faktor spesifik. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 1–15.